

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengandung makna segala tindakan dan pola tingkah laku warga negaranya harus sesuai dengan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Negara. Tujuan Negara Republik Indonesia telah diatur dalam alinea ke IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa Negara bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia seluruh tumpah darah Indonesia Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam usaha perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

Perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menimbang bahwa Negara Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan anak yang merupakan hak asasi manusia. Setiap anak berhak atas kelangsungan kehidupan, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana di amanatkan dalam undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 menyatakan bahwa perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan

kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

Perlindungan khusus merupakan bentuk kebijakan dan program perlindungan anak yang bisa berdimensi global, nasional maupun lokal, dapat berperan dalam melindungi anak dari tindakan kekerasan. Kebijakan berfungsi sebagai pedoman yang akan diimplementasikan oleh program aksi. Program aksi merupakan beragam tindakan (*course of action*) yang lebih aplikatif, berjangka waktu dan berwilayah geografis jelas. Perlindungan terhadap kesejahteraan anak juga merupakan bagian dari tanggung jawab orang tua dan kepedulian masyarakat. Tanpa partisipasi dari masyarakat, pendekatan legal formal saja ternyata tidak cukup efektif melindungi anak sehingga proses atau kebijakan terkait dengan upaya untuk memberikan perlindungan kepada anak khususnya dari berbagai tindak kekerasan yang dapat terjadi pada anak.

Adapun kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum¹. Setiap anak dilahirkan ke dunia memiliki kebebasan. Kebebasan tersebut mendapatkan pengakuan dari hak asasi manusia, oleh karena itu kebebasan anak dilindungi oleh Negara dan hukum tidak boleh dilenyapkan atau dihilangkan oleh siapapun. Anak tetaplah anak yang melekat sifat ketidak mandirian, mereka membutuhkan kasih sayang dan perlindungan

¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

terhadap hak-haknya dari orang dewasa. Anak dalam pertumbuhan serta perkembangan membutuhkan perlindungan dan perhatian dari orang tua, masyarakat juga Negara. Perlindungan terhadap anak merupakan pondasi anak untuk tumbuh menjadi dewasa serta dapat menjawab tantangan di masa depan.²

Kekerasan yang sering terjadi terhadap anak, berakibat merusak, serta berbahaya juga menimbulkan rasa takut pada anak. Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian, tidak hanya bersifat materi, tetapi juga bersifat immaterial seperti guncangan emosional dan psikologis yang dapat memengaruhi masa depan anak. Pelaku tindak kekerasan terhadap anak bisa saja orang tua (ayah dan atau ibu korban), anggota keluarga, masyarakat dan bahkan pemerintah sendiri (aparatus penegak hukum dan lain-lain). Kekerasan yang sering terjadi terhadap anak sangat rawan. Disebut rawan karena anak akan mempunyai resiko besar untuk mengalami gangguan atau masalah dalam perkembangannya, baik secara psikologis (mental), sosial maupun fisik.³

Anak adalah harapan bangsa dan apabila sudah sampai saatnya akan mengganti generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan Negara, dengan demikian, anak perlu dibina dengan baik agar mereka tidak salah dalam kehidupannya kelak. Setiap komponen bangsa, baik pemerintah maupun nonpemerintah memiliki kewajiban untuk secara serius memberi perhatian terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Komponen-komponen yang

²Nashriana, 2011, *perlindungan hukum pidana bagi anak di indonesia*, raja grafindo persada, Jakarta, hlm 13

³Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Refika Aditama, Jakarta. Hlm 1

harus melakukan pembinaan terhadap anak adalah orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah.⁴

Anak wajib dilindungi agar mereka tidak jadi korban dalam tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik dan sosial), karena tindakan yang pasif atau tindakan aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah) baik langsung maupun tidak langsung. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus di bantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapatkan perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental fisik maupun sosial.⁵

Sehubungan dengan hal tersebut maka sudah sepantasnya masyarakat Indonesia mendapatkan perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan yang secara nyata dalam berbagai aspek kehidupan. Anak merupakan karunia tuhan yang maha esa untuk dibina dan dijaga. Seorang anak merupakan amanah yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat yang berhak mendapatkan perlindungan hukum serta mendapatkan hak tanpa ia minta. Dalam pasal 1 angka 2 Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, mengatakan bahwa; Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,

⁴Ibid, Hlm 68

⁵ Ibid, Hlm 69

berkembangan dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁶

Tindak kekerasan terhadap anak di Kota Malang ternyata masih tinggi, dimana jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang masuk ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Malang, tahun 2015 yaitu sebanyak 28 kasus dan tahun 2016 meningkat menjadi sebanyak 32 kasus. Peningkatan terus terjadi pada tahun 2017 yaitu mencapai 38 kasus⁷. Tingginya kasus kekerasan anak menunjukkan rendahnya tingkat pengawasan kepada anak sehingga rentan terhadap terjadinya kekerasan. Berdasarkan data kekerasan anak tersebut bentuk kekerasan anak yang banyak terjadi yaitu bentuk kekerasan seksual selain bentuk kekerasan fisik yang dialami oleh anak yaitu tindak kekerasan seperti dipukul dan ditampar. Kasus kekerasan yang terjadi pada anak tersebut banyak dilakukan oleh orang-orang terdekat anak tersebut, yaitu misalnya keluarga serta masyarakat yang terdapat dilingkungan sekitar anak. Namun demikian pelaku adalah keluarga terdapat oleh anak tersebut, dimana permasalahan ekonomi dan kasus perceraian sangat rawan menjadi penyebab terjadinya kekerasan pada anak.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat telah terjadi 16 kasus kekerasan yang menyebabkan anak meninggal dunia dalam kurun Januari-Maret 2018. Ironisnya, pelaku kekerasan terbanyak adalah ibu. Dalam kurun tiga bulan ini, terdapat 23 kasus kekerasan terhadap anak dengan

⁶Soerjono soekanto, 2000, *pengantar sosiologi hukum*, rajawali, Jakarta, hlm 21

⁷<http://suryamalang.tribunnews.com/2017/05/10/terkait-kasus-kekerasan-kapolres-malang-kota-anak-bisa-jadi-pelaku-atau-korban>, diakses tanggal 01 Agustus 2018.

berbagai tindakan. Terkait dengan kekerasan yang dialami oleh anak, berbagai bentuk kekerasan yang terjadi yaitu: kekerasan fisik, seksual, verbal, psikologis kemudian penelantaran. Dalam penulisan ini penulis melihat bahwa angka kekerasan fisik ini menjadi bentuk kekerasan yang cukup tinggi. Adapun bentuk kekerasan fisik tersebut diantaranya kekerasan fisik, dipukul berulang, disekap, diseterika, dipasung, disulut rokok, ditanam hidup-hidup, bersama-sama menjatuhkan diri, hingga diracun.

Terjadinya kekerasan pada anak dapat dilakukan dari berbagai pihak, dimana kekerasan tersebut dapat dilakukan oleh keluarga, tetangga, guru, teman dan pihak-pihak yang sering melakukan interaksi secara langsung kepada korban. Namun demikian dalam ini pelaku kekerasan yang paling banyak adalah dari lingkungan sekolah sebanyak 87.6 persen dan lingkungan masyarakat sebanyak 17 persen.⁸

Semakin meningkatnya kasus kriminalitas di Indonesia berakibat pada timbulnya berbagai macam modus operandi dalam terjadinya tindak pidana. Hal ini menyebabkan seseorang yang menjadi korban pidana atau seorang pelaku pidana yang menjadi sasaran dari pelaku pidana ialah anak sebagai korban tindak pidana karena minimnya pengawasan dari orang tua. Salah satu tindak pidana yang telah terjadi dalam masyarakat adalah tindak pidana kekerasan fisik.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“TINJAUAN VIKTIMOLOGI DAN**

⁸Kpai.com, kekerasan pada anak, diakses tanggal 24 Juli 2018, pukul 18.30 WIB

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK (Studi Di Polresta Malang)”

B. Rumusan Masalah

1. Apakah ada peran anak sebagai korban yang memicu terjadinya tindak pidana kekerasan fisik?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan fisik?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran anak sebagai korban yang memicu terjadinya tindak pidana kekerasan fisik.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan fisik.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Sebagai sumbangan pengembangan pemikiran terhadap ilmu hukum, khususnya hukum pidana dalam kaitannya terhadap pemenuhan hak perlindungan dan keamanan untuk anak dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak.
 - b. Sebagai pedoman bagi para pihak atau peneliti lain yang ingin mengkaji secara mendalam tentang adanya pemenuhan hak perlindungan dan keamanan untuk pencegahan kekerasan terhadap anak.

2. Manfaat praktis

a. Bagi aparat penegak hukum

Sebagai rujukan dan masukan bagi aparat penegak hukum khususnya kepolisian dalam menangani pemenuhan hak anak sebagai upayapencegahan kekerasan terhadap anak.

b. Bagi pemerintah

Sebagai masukan dalam wujud pemenuhan hak perlindungan dan keamanan untuk anak sebagai upayapencegahan kekerasan terhadap anak.

c. Bagi masyarakat

Sebagai wacana bagi masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan hak perlindungan dan keamanan untuk anak sebagai upayapencegahan kekerasan terhadap anak.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan dimana hukum di konsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil di kaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain.⁹Metode pendekatan penelitian menggunakan sosiologis, pendekatan sosiologis ini digunakan untuk mengkaji masalah yang terjadi dimasyarakat atau penerapannya dalam kenyataan kemudian mengkaitkannya dengan perundang-undangan yang berlaku.Dapat dijadikan arahan untuk menganalisa gejala hukum yang

⁹Amiruddin, Zainal Asikin,2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 133.

timbul khususnya yang berkaitan dengan masalah pemenuhan hak perlindungan hukum terhadap anak dalam tindak pidana kekerasan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi yaitu di Polresta Malang, tepatnya di Kantor Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Malang Kota. Hal ini dikarenakan pada survey awal tindak pidana kekerasan anak di wilayah hukum Polresta Malang tergolong tinggi.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan jenis data primer dan jenis data sekunder, diantaranya adalah:

- 1) Jenis data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari Polresta Malang atau subjek penelitian. Sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara secara langsung dengan responden yaitu Kasat Reskrim Polresta Malang dan anggota UPPA yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak sebagai korban tindak kekerasan.
- 2) Jenis data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan. Sumber data sekunder ini diperoleh dari hasil studi kepustakaan berbentuk peraturan perundang-undangan serta peraturan lain yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak sebagai korban tindak kekerasan.¹⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara:

¹⁰Rony Hanijito Sumitro, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 55.

1. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan¹¹. Peneliti melakukan wawancara dengan cara bertatap muka langsung dengan para responden yang digunakan dalam menganalisis permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti.

2. Studi dokumen.

Yaitu studi dengan mengambil dokumen-dokumen dari instansi yaitu Polresta Malang dan Kantor Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Malang kota. Dalam studi dokumen data yang digunakan yaitu mengenai data kasus kekerasan paa anak di wilayah hukum Polresta Malang.

3. Studi Dokumentasi

Merupakan bentuk studi dengan melakukan dokumentasi dari lokasi penelitian yaitu berupa foto atau data-data pendukung penelitian.

4. Studi Kepustakaan

Yaitu cara untuk memperoleh data sekunder dengan mencari dan mempelajari literatur melalui tulisan para ahli dan peraturan perundang-undangan,serta peraturan yang terkait dengan pokok permasalahan tentang pemenuhan hak perlindungan dan keamanan untuk anak sebagai korban tindak kekerasan.

¹¹Cholid Narbuko dan Abu Achmadi,2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, hal. 81.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses membuat data agar data tersebut dapat / bisa ditafsirkan¹². Dari seluruh data yang di peroleh dan di kumpulkan secara lengkap dalam penelitian ini. Setelah itu data yang terkumpul dianalisis dan disusun dengan memilih data yang sesuai dengan kenyataan penelitian. Kemudian dikelompokkan menurut permasalahan. Dalam menganalisis data yang terkumpul, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan dan menjabarkan data-data yang telah diperoleh. data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas, dan merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yang bersumber dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku yang dapat diobservasi dari manusia.¹³Berdasarkan metode deskriptif akan menghasilkan gambaran fakta-fakta yang ada di lapangan yang kemudian di uraikan dan di analisis untuk dicari pemecahan dari permasalahan berdasarkan kondisi mengenai kenyataan yang kemudian di hubungkan dengan teori dan hukum yang terkait dengan pemenuhan hak anak sebagai korban tindak pidana kekerasan.

F. Rencana Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini, penulis membagi pembahasan ke dalam 4 bab yang dimana setiap bab dibagi atas beberapa sub-bab, sistematika penulisannya secara singkat adalah sebagai berikut:

¹²Dadang Kahmad, 2000, *Metode Penelitian Agama*, Pustaka Setia, Bandung, hal. 102.

¹³Burhan Ashofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.16.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode dan sistem penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan mengenai tinjauan pustaka yang meliputi deskripsi dan uraian yang mengenai bahan teori, doktrin, pendapat ahli, kajian-kajian yuridis yang mana nanti akan dijadikan landasan analisa hukum penulisan pada bab selanjutnya yaitu pembahasan pada bab III.

BAB III PEMBAHASAN.

Pada bab ini dipaparkan apa yang menjadi pada permasalahan dan pemaparan hasil penelitian yang dilakukan penulis serta menggunakan bahan hukum sehingga dapat ditemukan jawaban dari permasalahan tersebut.

BAB IV PENUTUP.

Bab ini berisi kesimpulan dan saran penulis terkait dengan permasalahan yang di angkat.